

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat adalah suatu pendekatan untuk revitalisasi masyarakat yang difokuskan pada memperkuat kapasitas penduduk, asosiasi, dan organisasi untuk bekerja, secara individu dan bersama dalam mendorong dan mempertahankan perubahan lingkungan yang positif (Pinkett & O'Bryant, 2003). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional karena memiliki jumlah yang dominan dalam setiap sektor ekonomi dalam hal mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan negara (Putri, 2020). Usaha Kecil di Indonesia menempati porsi 99 % dan 1 % usaha menengah dan besar (Sudati, Hanung, Dian, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang amat vital sebagai penyangga ekonomi daerah dalam menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. (Bank Indonesia, 2015). Kondisi ini tidak terlalu mengejutkan, karena banyak studi maupun data nasional menunjukkan kinerja UMKM relatif buruk dibandingkan dengan usaha besar, bahkan dengan UMKM di negara maju (Tambunan, 2012). Demikian juga hasil kajian Pusat Inovasi MKM APEC tentang daya saing global UMKM di 13 negara termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang UMKM-nya berdaya saing rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina (Susilo, 2010).

Rendahnya kinerja yang dihasilkan UMKM di Indonesia disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Dipta, 2012) atau dengan kata lain rendahnya kompetensi kewirausahaan (Susilo, 2010). Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pengembangan dan penguasaan ilmu pelaku UMKM dibidang manajemen, organisasi, teknologi, pemasaran dan kompetensi lainnya yang diperlukan dalam mengelola usaha. Terlebih lagi spirit kewirausahaannya. Harus adanya suatu gerakan pemberdayaan untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi pada UMKM, secara umum pemberdayaan berarti memberikan kekuatan kepada orang lain, dalam arti mengerahkan dan menegaskan kekuatan

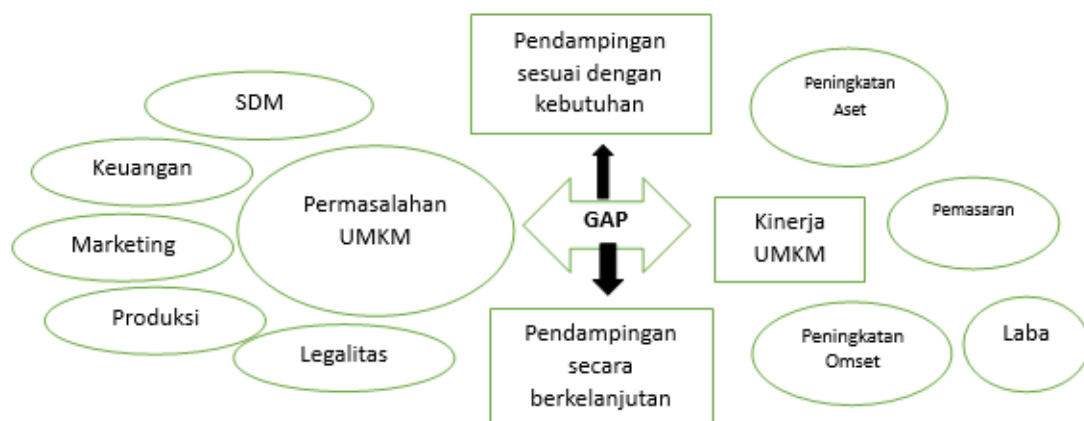
sebagai perwujudan peran masing-masing individu adanya sumber daya seperti keterampilan dan sikap, Jaringan hubungan (modal sosial), material dan peran orang lain untuk menentukan tujuan dan menindaklanjutinya (Pigg, 2002). Pada proses pemberdayaan memberikan kekuatan pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengoptimalkan sumber daya yang produktif, serta ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan (Khusna, 2019).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan bersama, yang artinya pemberdayaan suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan kekuatan kepada kelompok rentan dalam masyarakat sehingga menjadi mandiri, dalam hal ini termasuk kelompok atau individu yang mengalami masalah kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kelompok tersebut sehingga mereka terlepas dari permasalahan kemiskinan. Dengan proses pemberdayaan sebagai solusi untuk mencapai keadaan yang ingin dicapai, yaitu masyarakat yang memiliki *power*, masyarakat yang mandiri, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat ekonomi, fisik dan sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan pendapat, mempunyai pekerjaan yang tetap, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2005).

Pemberdayaan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat yang akan membawa paradigma baru dalam pembangunan berkelanjutan dengan prinsip *people-centered participatory* yaitu pusat dari pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan dalam memberdayakan masyarakat yaitu terdiri dari tiga aspek: Pertama, *enabling* melihat potensi yang ada dalam masyarakat sehingga menjadi peluang yang akan membuat masyarakat berkembang. Kedua, *empowering* memperkuat potensi yang telah dimiliki masyarakat melalui kegiatan yang positif berkaitan dengan penyediaan sumberdaya dan membuka berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin mandiri dan berdaya. Ketiga, *protecting* yang berkaitan dengan melindungi, membela dan memperhatikan kepentingan masyarakat lemah. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan menerapkan prinsip

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana akan membawa masyarakat menuju suatu keberlangsungan baik secara ekonomi dan sosial yang dinamis, sehingga masyarakat memiliki kemandirian.

Dalam proses pemberdayaan melalui pendampingan yaitu adanya bantuan dari pihak lain dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga memberikan solusi.(Indrawati, 2016).Tujuan dari pendampingan program UMKM kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnis serta kinerja UMKM. Program pendampingan UMKM di Kota Bandung pada 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yaitu bagaimana pelaku usaha dapat meningkatkan kinerja usahanya. Berikut gambaran pendampingan UMKM Kota Bandung yaitu: (1). Aspek Pengembangan Manajemen Sumber daya manusia, (2) Manajemen Keuangan, (3) Marketing, (4) Produksi, (5) Legalitas atau administrasi



Gambar 1. 1 Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM

Dari gambar diatas, setiap pelaku UMKM memiliki permasalahan yang berbeda – beda dengan demikian tugas dari seorang pendamping harus mengidentifikasi kendala dan tantangan sehingga program pendampingan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan setiap pelaku usaha. Pendekatan berbasis partisipasi dengan mengedepankan kerjasama secara langsung dalam melibatkan pelaku UMKM terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga menumbuhkan kemandirian dalam menjalankan bisnisnya.(Rahadi, 2017).

Kemampuan manajerial mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan usaha. UMKM yang memiliki manajer atau pemilik usaha dengan kemampuan manajerial yang baik cenderung lebih mampu mengatasi tantangan pasar, berinovasi, dan berkembang dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak pemilik UMKM yang belum memiliki kompetensi manajerial yang memadai, sehingga diperlukan intervensi berupa pendampingan.

Konsep pendampingan menjadi relevan dalam konteks ini sebagai bagian dari pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan pemilik dan manajer UMKM. Pendampingan dalam konteks UMKM tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan teknis, tetapi juga mencakup peran sebagai fasilitator, pendidik, dan motivator. Melalui pendampingan yang efektif, pemilik UMKM dapat meningkatkan kemampuan manajerial mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan performa bisnis.

Peran pendamping sebagai fasilitator memungkinkan UMKM untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan informasi yang kritis untuk pengembangan bisnis. Sebagai pendidik, pendamping berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial, yang penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai motivator, pendamping membantu meningkatkan semangat dan komitmen pemilik UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis.

Pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sering digunakan untuk mengukur performa UMKM dari berbagai perspektif, seperti keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan meningkatnya kemampuan manajerial melalui pendampingan, diharapkan terjadi peningkatan performa UMKM di semua dimensi BSC.

Namun, meskipun pentingnya peran pendamping telah diakui, masih ada sedikit penelitian yang secara empiris menguji bagaimana pendampingan berpengaruh terhadap performa UMKM melalui mediasi kemampuan manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguji pengaruh peran pendamping terhadap performa UMKM yang dimediasi oleh

kemampuan manajerial, menggunakan pendekatan Balanced Scorecard sebagai alat ukur performa.

Penelitian ini juga berkontribusi pada penguatan keilmuan pendidikan masyarakat, dengan menekankan pentingnya peran pendampingan dalam pemberdayaan UMKM, yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran mengenai peran pendamping UMKM, kemampuan manajerial dan performa UMKM di Kota Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh antara peran pendamping UMKM terhadap kemampuan manajerial UMKM di Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh antara peran pendamping UMKM terhadap performa UMKM di Kota Bandung?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kemampuan manajerial UMKM terhadap performa UMKM di Kota Bandung?
5. Apakah kemampuan manajerial UMKM signifikan memediasi pengaruh peran pendamping UMKM terhadap performa UMKM di Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran mengenai peran pendamping UMKM, kemampuan manajerial dan performa UMKM di Kota Bandung.
2. Pengaruh antara peran pendamping UMKM terhadap kemampuan manajerial UMKM di Kota Bandung.
3. Pengaruh antara peran pendamping UMKM terhadap performa UMKM di Kota Bandung.
4. Pengaruh antara kemampuan manajerial UMKM terhadap performa UMKM di Kota Bandung.
5. Kemampuan manajerial UMKM signifikan memediasi pengaruh peran pendamping UMKM terhadap performa UMKM di Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dimanfaatkan secara teoritis maupun praktis.

- 1) Manfaat teoritis hasil penelitian
 - a. Mengembangkan khazanah keilmuan di bidang penyelenggaraan program pendampingan.
 - b. Memberikan masukan berupa pengetahuan dan pengalaman bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung mengenai pengaruh peran pendamping UMKM terhadap peningkatan performa UMKM.
- 2) Manfaat praktis hasil penelitian
 - a. Bagi penyelenggara program pendampingan, diperoleh gambaran terkait peran pendamping agar lebih maksimal dalam memberikan bekal sebelum melakukan pendampingan.
 - b. Bagi pendamping, semakin menguatkan perannya dalam mendampingi UMKM dampingannya.
 - c. Bagi UMKM, semakin mengetahui dan dapat memaksimalkan kemampuan manajerialnya dalam melakukan aktivitas usaha.

1.5. Struktur Organisasi Tesis

1. BAB I diantaranya studi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan dikaji yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian
2. BAB II merupakan kajian teori yang mencakup teori pendampingan UMKM, peran pendamping, kemampuan manajerial serta performa UMKM.
3. BAB III merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang desain penelitian, Populasi dan sampel penelitian, Instrumen penelitian, Prosedur penelitian dan analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian memaparkan hasil temuan dan pembahasan dari pengaruh peran pendampig UMKM terhadap peningkatan perfoma UMKM.
5. BAB V merupakan kesimpulan, rekomendasi dan implikasi yang menjabarkan hasil temuan pada penelitian mengenai peran pendamping yang paling dominan dalam proses pendampingan serta memberikan rekomendasi terhadap aspek yang paling menentukan dalam pendampingan UMKM di Kota Bandung.